



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3.6.6/656 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
- b. bahwa sebagai upaya menjamin efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dalam dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan/instrumen untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan;
 - c. melaksanakan evaluasi tindak lanjut pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi; dan
 - e. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang.
- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3.6.6/656 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KOTA SEMARANG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wali Kota Semarang | Pengarah |
| 2. | Wakil Wali Kota Semarang | Pengarah |
| 3. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; | Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang | Sekretaris |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 8. | Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang | Anggota |
| 9. | Kepala Seksi Intel Kepolisian Resor Kota Besar Semarang | Anggota |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001